TINJAUAN ATAS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH PADA DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG

YUNIKA SARAH

Diploma III Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

This research was at the Department of Labor in Bandung. Budgeting is a task with technical nature, every company or agency is always needed a budgeting. Budgeting issues need to be solved, how the company or agency is able to predict with exactly about the drafting of the document. The phenomenon that occurs is delayed in the budgeting and time of preparation of the budget revenue and expenditure was not precisely.In the preparation of this thesis, the author presents the results of research to the development of the local government budgeting. The purpose of this study was to determine the budgeting process as well as the phenomena or problems that occur at the Department of Labor in Bandung .The research method that used is descriptive method. Meanwhile the data collection techniques to understand the budgeting process is to perform and document observations and interviews with related agencies.Based on the results of research to the preparation of the local government budgeting (APBD) through the results of the discussion that the budgeting process at the Department of Labor in Bandung was good, because the drafting process starts from the determination of the budgeting, delivery of the budgeting, and the ratification of the draft DPA-SKPD.

Keywords **: *Preparation of the local government budget***

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perubahan sistem politik, sosial, dan kemasyarakatan secara ekonomi yang dibawa oleh arus reformasi telah menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintah yang baik. Tuntutan ini perlu dipenuhi dan didasari langsing oleh para manajer pemerintahan daerah. Seiring dengan, PP No 105/2000 yang diganti menjadi PP No 58/2005 mensyaratkan perlu dilakukannya pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan (neraca daerah, arus kas, dan realisasi anggaran) oleh kepala daerah. Selain itu, Peraturan Pemerintah 58 tahun 2005 juga telah melahirkan regulasi baru sebagai aturan pelaksanaannya, yaitu Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam suatu negara yaitu untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara, pelaporan keuangan negara, pemeriksaan keuangan negara, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik. Anggaran kinerja adalah anggaran yang penyusunannya didasarkan pada kegiatan dengan mencantumkan indikator-indikator yang dapat menjelaskan pencapaian sasaran kegiatan secara langsung maupun hasil serta dampaknya kemudian. Tujuan anggaran kinerja adalah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara luas (transparan) dengan menampilkan kegiatan baik dalam bidang dan program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat (maka setiap sumber pendapatan dan pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan dan jelas penggunaannya pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan). Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa pada setiap awal tahun anggaran, setiap SKPD mengajukan anggaran yang dibutuhkan dan kemudian dituangkan dalam Dokumen Pagu Anggaran (DPA), guna membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan dana. Setelah dana tersebut cair kemudian digunakan untuk keperluan kantor, maka Kepala Badan selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai pejabat mengelola keuangan, harus mempertanggungjawabkan kepda Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah (PKPKD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam melakukan pertanggungjawaban tersbut, dokumen yang disampaikan adalah Surat Petanggungjawaban (SPJ). Dalam hal ini. Penggunan Anggaran (PA) melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA yang dalam menatausahakannya dibantu oleh bendahara pengeluaran pembantu yang berada di setiap bidang untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran Badan. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawababkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mudah dilakukan. Perubahan paradigma anggaran daerah dilakukan untuk menghasilkan anggaran daerah yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat daerah setempat terhadap pengelola keuangan

daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tetap berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi, yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Salah satu tujuan dibuat anggran adalah untuk membiayai seluruh belanja rutin pegawai dan kegiatan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun permasalahan yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah waktu penyusunan yang terlambat, waktu pelaporan yang seharusnya dilaporkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggung jawaban baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor teknis seperti bukti pengeluaran yang belum sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang sah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian pada instansi pemerintahan dengan judul Penelitian**: "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun pokok masalah yang ingin penulis ketahui dalam Tinjauan Atas Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
2. Apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang diterapkan dalam proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk melakukan tinjauan terhadap penganggaran pada instansi pemerintah yang hasilnya akan digunakan penulis untuk menyusun laporan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dan upaya yang diterapkan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan msalah yang terjadi pada proses penyusunan anggaran pendapatan belaja daerah. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, maka fenomena pada penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah dapat diperbaiki dengan memberikan upaya yang bermanfaat.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan informasi bagi peneliti lain yang memiliki minat yang sama terhadap pengembangan ataupun pembuatan karya penelitian yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Anggaran

M. Nafarin (2012 : 19) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Menurut Mursyidi (2013 : 12**)** menyatakan bahwa anggaran sebagai berikut:

> "Anggaran adalah pedoman dan tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang tertulis dan dinyatakan dalam satuan rupiah, yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode untuk mencapi tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2011 : 70) yang dikutip kembali oleh Yanthi Oktafianthi (2012) anggaran mempunyai beberapa macam fungsi antara lain adalah sebagai berikut:

1) Anggaran sebagai alat perencanaan
2) Anggaran sebagai alat pengendalian
3) Anggaran sebagai alat kebijakan
4) Anggaran sebagai alat politik
5) Anggran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
6) Anggaran sebagai alat penilai kerja
7) Anggaran sebagai alat motivasi

2.2 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Peraturan pemerintah dan keputusan menteri, yakni UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan PP No.105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang secara spesifik disebutkan pada pasal 8 yang berbunyi bahwa "APBD disusun dengan pendekatan kinerja", dan disyaratkan pada pasal 20 ayat 2, "untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dikembangkan Standar Analisis Biaya (SAB), tolak ukur kinerja dan standar biaya", serta dalam Kepmendagri No.29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Menurut Sony Sumarsono (2010 : 115) yang dimaksud APBD adalah sebagai berikut:

> "Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 januari sampai 31 Desember".

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa APBD adalah suatu anggaran daerah dan tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun anggaran

2.3 Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Proses penyusunan anggaran pada umumnya disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Proses penyusunan APBD ini mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pada dasarnya yng berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan penganggaran lainnya ada ditangan pimpinan tertinggi perusahan yang paling bertanggung jawab atau kegiatan perusahaan keseluruhan.

Dengan demikian tugasnya menyiapkan dan menyusun anggaran serta

kegiatan-kegiatan penganggaran lainnya tidak harus ditangani oleh pimpinan tertinggi perusahaan.

Tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPPD yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman kepada RPJMD.
2) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),
3) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
4) RKPD membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap Tahun.
6) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).
7) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
8) Kebijakan umum APBD dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD.
9) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Menurut Abdul Halim (2011:57) Permasalah Umum yang terjadi dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut:

1) Kurangnya keterpaduan, konsistensin dan sinkronisasi perencanaan dengan pengangaran.
2) Kurangnya keterpaduan, konsistensin dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.
3) Pertanggung jawaban kinerja kegiatan masih tetap cenderung fokus pada pelaporan penggunaan dana.
4) Keterlambatan penyusunan rencana strategis maupun KUA dan PPAS.

Beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pendekatan kinerja yang artinya pendekatan ini digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
2) Pendekatan penganggaran program yang artinya pendekatan ini menekankan pada efektifitas penyusunan anggaran.
3) Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang artinya pendekatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang beralamat di Jl. R.A.A Martanegara No. 04 Bandung.

Menurut Iwan Satibi (2011:74) pengertian objek penelitian yaitu sebagai berikut:

> "Objek penelitian secara umum akan memetakan atau menggambarkan wilayah penelitian atau sasaran penelitian secara komprehensif, yang meliputi karakteristik wiliyah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi lain-lain sesuai dengan pemetaan wilayah penelitian yang dimaksud".

3.2 Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian guna menunjang kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis menggunakan data dan informasi yang saling berhubungan dengan metode penelitian yang mencangkup pengolahan data.

Pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian untuk membuat gambaransecara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat–sifat pada suatu objek penelitian tertentu. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi megenai keadaan saat ini.

Menurut Sugiyono (2013:2) pengertian metode penelitian adalah sebagai berikut:

> "Metode penelitian adalah pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan".

Selain itu, metode deskriptif Menurut Husein Umar (2013:22) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah sebagai berikut:

> "Metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa ,melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum".

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang sedang terjadi pada saat sekarang, dengan didukung oleh fakta-fakta yang benar dan akurat. Dalam hal ini yang dilakukan penulis adalah mempelajari dan membandingkan proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terdapat dalam teori dan yang diterapkan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah tersebut.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:224).

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data maka teknik yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut harus benar dan sesuai kegunannya. Jika peneliti tidak dapat mengetahui teknik apa yang akan digunakan maka penlitian yang dilakukan tidak akan tepat sasaran dan tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 1. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu (a) Wawancara (*Interview*), (b) Observasi (*Observation*), (c) dokumentasi (*Documentation*), (d) catatan lapangan (*filednotes*) dan 2. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Berikut uraian dari teknik-teknik tersebut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian secara langsung pada objek penelitian di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yang dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan catatan lapangan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara berisikan beberapa pertanyaan seputar permasalahan dan tujuan dari penelitian yang membahas tentang Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tujuan dari wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan tinjauan atas proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

b. Observasi (*Observation*)

Dari teknik observasi ini, penelitian langsung meneliti ketempat yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dan melakukan pengamatan langkah penyusunan anggaran, dengan harapan peneliti dapat memperoleh data secara langsung dan gambaran lebih jelas mengenai pelaksanaan sistem yang ada**.**

Pengumpulan data tersebut melalui pengamatan dan pencatatan oleh pengumpul data terhadap gejala atau peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian. Observasi ini dilakukan untuk memahami suatu cara dari pandangan orang-orang yang terlibat didalamnya dengan tujuan agar memperoleh suatu informasi yang jelas dan benar mengenai Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dlakukan dengan cara melihat, menganalisa data-data yang berupa dokumentasi yang berkaitan dan menunjang penelitian ini.

d. Catatan Lapangan (*filednotes*)

Penelitian membuat catatan singkat mengenai pokok-pokok pembicaraan dan pengamatan seputar Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah cara atau teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip tentang pendapat, teori dan hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah penyelidikan, untuk studi kepustakaan ini penulis memperoleh data dengan membaca dan mempelajari buku-buku sumber dan catatan penulis yang diperoleh pada saat perkuliahan.

3.2.2 Sumber Data

Untuk mendapatkan data peneltian ini, data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara. Selain dari sumber data primer, data yang diperoleh penulis juga berasal dari sumber data sekunder yaitu penulis melakukan pencarian data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, catatan-catatan serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

1. Data Primer

   Sugiyono (2012:139) menjelaskan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

   Suharsimi Arikunto (2013:172) pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.

   Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data dari pihak pertama yang biasanya melalui tahapan wawancara.

2. Data Sekunder

   Sugiyono (2012:141) mendefiniskan data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen.

   Ulber Silalahi (2012:289) menyatakan bahwa sumber data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain

yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data sekunder merupakan suatu cara membaca, mempelajari dan memahami dengan sumber-sumber yang lain sebelum penelitian dilakukan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapat dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah sejarah singkat instansi, struktur organisasi, uraian tugas dari struktur organisasi, aktivitas instansi, dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Poin-poin penting penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang meliputi :

1. Rencana Penganggaran Jangka Menengah Daerah
2. Rencana Penganggaran Jangka Menengah
3. Rencana Strategi Anggaran
4. Rencana Kerja
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
6. Rencana Kerja Pemerintah
7. KUA dan PPAS
8. DPRD
9. Nota Kesepakatan
10. RAPERDA APBD

Poin-poin diatas merupakan tahap kegiatan yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan kegiatan anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka dengan disusunnya (APBD) berarti program dan rencana operasional tahunan yang dianggarkan akan mulai dilaksanakan.

Dalam Pelaksanaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

1) Kepala Daerah menyusun rencana mulai dari visi, misi, tujuan, kebijakan dan program dalam jangka waktu 5 tahun.
2) Kemudian dijabarkan ke dalam perencanaan untuk satu tahun yang disebut Renja-SKPD
3) Setelah itu menyusun RKPD paling lambat akhir bulan Mei
4) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah maka Pemerintah Daerah akan menyusun KUA dan PPAS.
5) Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas KUA dan PPAS.
6) Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang disususn berdasarkan Prestasi kerja yang akan dicapai.
7) RKA-SKPD ini kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
8) Hasil pembahasan ini disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
9) Setelah ada kesepakatan antara kepala Daerah dan DPRD dibuat Nota kesepakatan.
10) Menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tahap Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPPD yang memuat visi, misi, tujuan strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, dengan berpedoman kepada RPJMD.
2) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu

1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP),

3) Renja SKPD merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
4) RKPD membuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
5) Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap Tahun.
6) Kepala daerah menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD dan selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).
7) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
8) Kebijakan umum APBD dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama kepala daerah dan pimpinan DPRD.
9) Kepala daerah berdasarkan nota kesepakatan menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh penulis di lapangan mengenai Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Penulis menyimpulkan bahwa proses penyusunan APBD tersebut telah sesuai dengan Pemendagri No.13 Tahun 2006.

4.2.2 Analisis Kendala yang dihadapi dan Upaya yang diterapkan dalam Proses Penyusunan APBD yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dihadapkan dengan berbagai hambatan yang dapat mengganggu aktivitas pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu seperti :

1) Keterlambatan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keterlambatan penyusunan anggaran terjadi karena adanya tarik ulur atau adanya perbedaan pendapat penyusunan anggaran yang belum disetujui antara dewan eksekutif dengan dewan legislatif, perbedaan pendapat tersebut menghabiskan waktu yang cukup lama sekitar 2 bulan untuk mencapai satu pendapat yang sama.
2) Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggungjawaban tersebut baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan.

Sedangkan menurut Halim (2011:57)

Permasalah Umum yang terjadi dalam Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yaitu sebagai berikut:

5) Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan pengangaran.
6) Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD.
7) Pertanggung jawaban kinerja kegiatan yang masih belum fokus terhadap program kegiatan atau pertanggung jawaban kegiatan.
8) Keterlambatan penyusunan rencana strategis maupun KUA dan PPAS.

Berdasarkan hambatan dalam pelaksanaan penyusunan APBD sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Halim (2011:57).

Upaya yang diterapkan dalam mengatasi masalah proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Berdasarkan kendala yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung ada beberapa solusi untuk mengatasi kendala tersebut diataranya adalah sebagai berikut:

1) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung harus lebih *detail* dalam memberi penjelasan tentang rencana yang telah disusun dan tegas dalam mengatur waktu kepada aparatur dan melakukan penelitian keluhan yang sering terjadi dimasyarakat disetiap tahunnya agar ketika menyusun perencanaan di tahun selanjutnya tidak terjadi perbedaan pendapatan ketika membahas rencana kegiatan dengan anggota dewan legislatif.
2) Setiap SKPD harus memeriksa kembali dan mengumpulkan bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan secepanya, karena semua Laporan Pertanggungjawaban nantinya akan melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tentunya pemeriksaan oleh BPK tersebut akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu setiap SKPD harus bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin.

Sedangkan menurut teori ada beberapa upaya dalam mengatasi permasalahan umum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melakukan pendekatan kinerja yang artinya pendekatan ini digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.
2) Pendekatan penganggaran program yang artinya pendekatan ini menekankan pada efektifitas penyusunan anggaran.
3) Pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang artinya pendekatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan perumusan program kegiatan suatu organisasi.

Berdasarkan cara penyelesaian yang masalah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung telah sesuai dengan teori yang telah dikemukakan oleh Halim (2011:58).

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan sekaligus memberikan saran sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Dalam Proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung mengalami masalah salah satu masalahnya yaitu dalam pelaporan pertanggung jawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggungjawaban tersebut baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Dalam Proses Penyusunannya meliputi tahap pelaksanaan anggaran, dimana antara satu dengan yang lainnya sangat berhubungan erat, karena dokumen-dokumen yang digunakan dirancang dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, maka Penyusunan APBD yang dilaksanakan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dapat dikatakan dengan baik.

2. Beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung diantaranya adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dan dewan legislatf sehingga mengulur waktu yang cukup lama, serta Laporan pertanggungjawaban yang seharusnya dilaporkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya, mengalami pengunduran waktu atau laporan pertanggungjawaban tersebut

baru dilaporkan lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Dan dalam upaya penanganan masalah yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung yaitu harus lebih tegas lagi dalam menetapkan waktu penyusunan Anggaran Pendapat Belanja Daerah serta menjaga keharmonisan antara eksekutif dan dewan legislatif.

5.2 Saran

Dalam kesempatan ini penulis ingin memberikan masukan atau saran yang berkaitan dengan proses penyusunan APBD di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penyusunan yang mengalami hambatan Dinas Tenaga Kerja harus melakukan beberapa hal dalam penyelesaian hambatan tersebut dengan melakukan evaluasi, laporan bulanan yang harus diperiksa dengan teliti, ataupun laporan pertriwulan.

2. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung harus lebih tegas lagi dalam menetapkan waktu pemutusan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta harus bisa mengambil nilai positif atau mengambil poin-poin penting dalam pembahasan rencana kegiatan agar perbedaan pendapat yang terjadi antara eksekutif dan dewan legislatif tidak terjadi dalam waktu yang lama yang dapat menghambat keterlambatan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dan lebih memfokuskan lagi pada kinerja program pelakasanaan proses penyusunan dan harus bisa membagi waktu dan mempunyai cadangan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku:

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Jakarta:Salemba Empat.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.

Baldric Siregar,dkk. 2013. *Akuntansi Biaya Edisi Kedua.* Jakarta:Salemba Empat.

Catur Sasongko dan Safrida Rumondang Parulian. 2010. *Anggaran.* Jakarta:Salemba Empat.

Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, *Edisi Kedua.* Jakarta:Salemba Empat.

Halim,Restianto, dan Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta:UUP STIM YKPN.

Husein Umar. 2010. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Edisi Kedua.* Jakarta:Rajawali Pers.

Iwan Satibi. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi.* Bandung:Ceplas.

M. Nafarin. 2012 . *Penganggaran Perusahaan,* Selemba Empat:Jakarta.

Sony Sumarsono. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah.* Yogyakarta:Graha Ilmu.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:Rineka Cipta.

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung:PT Refika Aditama.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Linna Ismawati. 2010. *Penulisan*

Karya Ilmiah. Jakarta:Genesis Press.

Peraturan dan Undang-Undang:

Peramendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2013.

Sumber dari Jurnal:

Dika Rizki W (2010). Studi Deskriptif Tentang Proses Penyusunan Anggaran Daerah di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

Yanthi Oktafianthi (2011). Tinjauan Atas Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.http://elib.unikom.ac.id

http://KamusKeuangan.com

www.warsidi.com/2010/01/penyusunan-dan-penetapan-apbn-dan-apbd.html?m-